

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
(PDRB), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM  
(DAU), DANA ALOKASI DAERAH (DAK) DAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2020**

**SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Eni Rakhmawati

Nomer mahasiswa : 18313185

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
(PDRB), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM  
(DAU), DANA ALOKASI DAERAH (DAK) DAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2020**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat ujian akhir guna

memperoleh gelar Sarjana Strata-1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Eni Rakhmawati

Nomor Mahasiswa : 18313185

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini **menyatakan** bahwa skripsi ini telah ditulis deogan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yo zLsct:a, 14 juli 2022

Penulis,

  
  
**Eni Rakhmawati**

## PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU),  
DANA ALOKASI DAERAH (DAK) DAN INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

TAHUN 2010-2020

Oleh :

Nama : Eni Rakhmawati

NIM : 18313185

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta , 15 Juli 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing

Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D



**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI DAERAH (DAK) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2020**

Disusun Oleh : **ENI RAKHMAWATI**

Nomor Mahasiswa : **18313185**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 09 Agustus 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Akhsyim Afandi,Drs.,MA.Ec.,  
Ph.D.

Penguji : Abdul Hakim,,S.E., M.Ec., Ph.D. 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, SE., M.Si.,Ph.D.,CFrA

## KATA PENGANTAR

*Assalam'ualikum Wr.Wb*

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat , rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammada SAW beserta keluarga dan pada sahabat berkat syafaatnya kita masih diberikan kenikmatan kehidupan dengan penuh kedamaian atas izin Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana Strata-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul **“Analisi Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2010-2020”**

Dalam penyusunan laporan penelitian ini penulis banyak kelemahan dan kekurangan, segala bentuk kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak pihak lain yang terkait. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarkanya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kesehatan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Ibunda tercinta Ibu Satimah yang telah melahirkan penulis kedunia serta mendukung penulis dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penulis.
3. Ayahanda tercinta Bapak Tri Winarno yang telah memberikan dukungan moral bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selama masa bimbingan sudah meluangka baik waktu, tenaga dan pikiran

dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Sahabudin Sidiq. SE. M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi.
6. Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik dan kepada Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang dengan sabra telah memberikan pengajaran selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis dalam hal ini berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada semua pihak dan menyadari masih terdapat banyaknya kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

المعهد الإسلامي  
الاستدرا الأندو  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



## Table of Contents

BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat penelitian .....	6
BAB II .....	7
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	7
2.1. Kajian Pustaka .....	7
2.1.1. Penelitian Sebelumnya .....	7
2.2. Landasan Teori .....	8
2.2.1. Konsep Kemiskinan .....	8
2.2.2. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	9
2.2.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	10
2.2.4. Konsep Dana Alokasi Umum (DAU) .....	11
2.2.5. Konsep Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	12
2.2.6. Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	13
2.3. Hubungan Antar Variabel .....	15
2.3.1. Hubungan Antara PDRB Terhadap Kemiskinan .....	15
2.3.2. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemiskinan .....	16
2.3.3. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan .....	16
2.3.4. Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan .....	17
2.3.5. Hubungan Antara IPM Terhadap Kemiskinan .....	17
2.4. Kerangka Pemikiran .....	18
2.5. Hipotesis .....	18
BAB III .....	20
METODE PENELITIAN .....	20
3.1. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data .....	20
3.1.1. Jenis Data .....	20
3.1.2. Sumber Data .....	20
3.1.3. Cara Pengumpulan Data .....	20

3.2	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	21
3.2.1	Variabel Dependen.....	21
3.2.2	Variabel Independen.....	21
3.3	Metode Analisis Data.....	23
3.3.1.1	Metode Common Effects Mode .....	24
3.3.1.2	Metode <i>Fixed Effects Model</i> (FEM) .....	24
3.3.1.3	Metode <i>Random Effect Model</i> (REM) .....	24
3.4	Pemilihan Model.....	25
3.4.1	Uji Statistik F atau <i>Chow Test</i> .....	25
3.4.2.	Hausman Test .....	25
3.4.3.	Uji Statistik.....	26
3.4.3.1	Uji T .....	26
3.4.3.2	Uji F .....	27
3.4.3.3	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	28
BAB IV	.....	29
HASIL DAN ANALISIS	.....	29
4.1.	Deskripsi Data.....	29
4.2.	Hasil dan Analisis Data .....	30
4.2.1	Pemilihan Model Regresi.....	30
4.2.1.1.	<i>Chow Test</i> (Uji F-Statistik).....	30
4.2.1.2.	Uji Hausman.....	31
4.2.1.3.	Estimasi Hasil <i>Fixed Effect</i> .....	32
4.3.	Uji Hipotesis.....	32
4.3.1.	Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	32
4.3.3.	Uji T .....	33
4.4.	Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen .....	34
4.4.1.	Analisis Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten .....	34
4.4.2.	Analisis Pengaruh PAD terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten .....	34
4.4.3.	Analisis Pengaruh DAU terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.....	35
4.4.4.	Analisis Pengaruh DAK terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.....	35
4.4.5.	Analisis Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten .....	36
BAB V	.....	37
KESIMPULAN DAN SARAN	.....	37

5.1. Kesimpulan.....	37
5.2. Implikasi dan Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA .....	39
LAMPIRAN .....	42
Lampiran I.....	42
Lampiran II.....	49
Lampiran III.....	50
Lampiran IV.....	51
Lampiran V.....	53
Lampiran VI.....	54



## DAFTAR TABLE

Tabel 1.1- jumlah penduduk miskin antar pulau .....	1
Tabel 4.2-Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	29
Tabel 4.3- Hasil Uji Chow.....	31
Tabel 4- Hasil Uji Hausman .....	31
Tabel 5.4- Hasil Fixed Effect.....	32



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1- Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa.....**Error! Bookmark not defined.**



## ABSTRAK

Masalah utama makro ekonomi yang dialami semua negara adalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2010-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode estimasi *Fixed Effect* menggunakan *software Eviews 10*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB dan DAU berpengaruh negative dan signifikan. Sedangkan variabel PAD berpengaruh positif tidak signifikan, variabel DAK berpengaruh negative dan tidak signifikan. Kemudian variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan.

**Kata Kunci :** Kemiskinan, PDRB, PAD, DAU, DAK dan IPM.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah utama makro ekonomi di suatu negara salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan menurut Todaro merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga dalam perhitungan kemiskinan menurut BPS tahun 2021 dalam memenuhi kebutuhan dasar ketika pengeluarannya dibawah garis kemiskinan sebesar Rp. 2.187.756 dalam rumah tangga per bulan.

Diketahui masalah kemiskinan di Indonesia tahun 1998 sebesar 24,2% hingga tahun 2019 sebesar 9,22% mengalami penurunan. Akan tetapi dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,19%. Dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang menyerang dunia mengakibatkan angka kemiskinan meningkat.

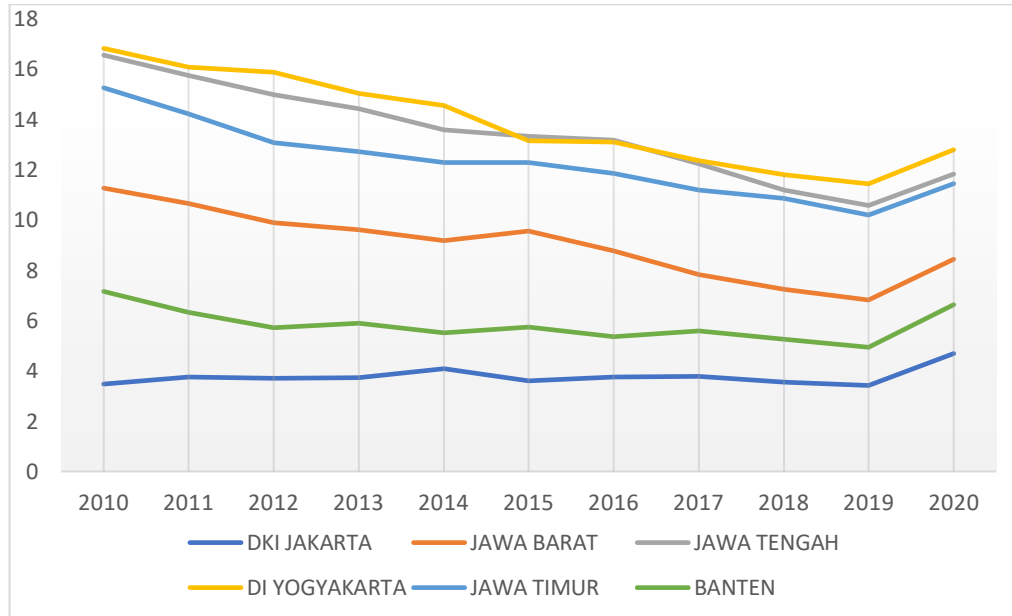
Berikut data Tingkat Kemiskinan antar pulau 2021 di pulau Sumatera tingkat kemiskinan sebesar 9,81%, di pulau Jawa tingkat kemiskinan sebesar 8,81%, di pulau Nusa Tenggara tingkat kemiskinan sebesar 12,9%, di pulau Kalimantan tingkat kemiskinan sebesar 5,93%, di pulau Sulawesi tingkat kemiskinan sebesar 11,17% dan di pulau Papua tingkat kemiskinan sebesar 17,97%. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara pulau-pulau besar lainnya yang ada di Indonesia.

**Tabel 1.1- jumlah penduduk miskin antar pulau**

Pulau	Jumlah penduduk miskin(ribu jiwa)
Sumatera	5862,65
Jawa	14023,53
Nusa Tenggara	2093,04
Kalimantan	975,41
Sulawesi	2007,07
Papua	1541,93



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih terpusat di pulau jawa. Dengan demikian menyatakan kemiskinan terbanyak berada pada pulau jawa. Berikut grafik kemiskinan provinsi dipulau jawa :



Gambar 1- Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa

Sumber : BPS Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dipulau jawa cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010-2019 . Kemiskinan tertinggi dipulau jawa berada pada provinsi DI Yogyakarta dan kemiskinan terendah berada di provinsi DKI Jakarta, selanjutnya kemiskinan terendah kedua berada di provinsi Banten. Pada tahun 2020 pemerintah memberikan bantuan social kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Kemiskinan yang terjadi di DKI Jakarta banyak yang disebabkan karna masyarakat mengandalkan bansos sebagai pendapatan utama mereka, selanjutnya di provinsi Banten juga diberika bantuan sosial akan tetapi masyarakat di Banten mengalokasikan bansos untuk membeli rokok dan kopi sehingga menyebabkan kemiskinannya semakin meningkat.

Provinsi banten khususnya Banten Utara yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan memiliki letak daerah yang strategis dan memiliki infrastuktur yang memadai. Selain itu, sebagai penyangga ibukota membuat

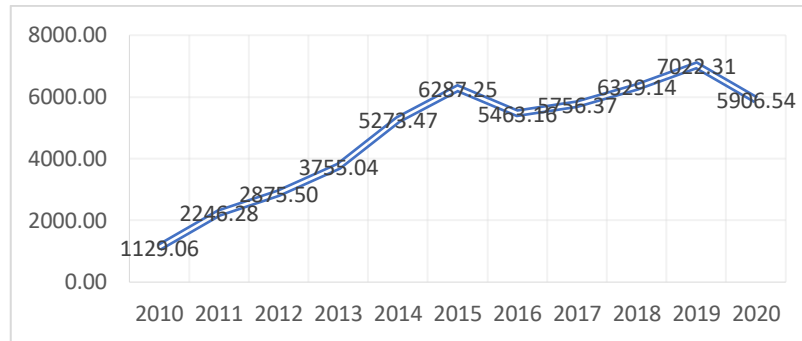
pertimbangan para investor untuk berinvestasi. Karena daerah tersebut cukup representatif bagi kegiatan penanaman modal untuk berbagai sektor.

Dalam mengurangi kemiskinan menurut Todaro yang dimana penyebab kemiskinan ada 5 antara lain karena pelayanan masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, distribusi pendapatan yang belum optimal, tingkat pengangguran yang masih relative tinggi, penguasaan teknologi yang masih tergolong rendah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dari penyebab kemiskinan tersebut dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia melalui pelayanan yang masih rendah. Ketika pelayanan dalam pendidikan dan kesehatan tinggi maka indeks pembangunan manusianya juga ikut meningkat supaya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya menaikkan pelayanan yang ada membutuhkan aliran dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan memeberikan pelayanan masyarakat yang semakin baik maka akan menaikkan IPM.

Peningkatan IPM akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita masyarakat yang akan meningkat, yang dapat dilihat melalui distribusi pendapatan yang semakin merata ditandai dengan peningkatan PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat. Hal-hal tersebut menyebabkan tingkat kemiskinan semakin menurun di Provinsi Banten.

Banyaknya investasi yang masuk akan meningkatkan PDRB, dalam suatu wilayah regional atau daerah kesejahteraan masyarakat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena salah satu indikator keberhasilan ekonomi dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin (Hermanto S. dan Dwi W. 2008). Selain itu PDRB juga merupakan salah satu indicator dalam melihat Pendapatan Asli Daerah tersebut.



**Gambar 1.2-PAD Provinsi Banten**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Banten tahun 2010-2020*

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 Pendapatan asli daerah provinsi banten sejumlah Rp. 1129,06 miliar terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sejumlah Rp. 5906,54 miliar. Terdapat beberapa sumber keuangan didaerah antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pinjaman Daerah
3. Dana tugas pembantuan
4. Dana dekonsentrasi
5. Dana perimbangan (Dana bagi hasil, DAU, DAK)

Pengalokasian dana pastinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan biasanya dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Sehingga pengalokasian dana yang tidak optimal dapat mengakibatkan angka kemiskinan semakin bertambah.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan pengetahuan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2020 ?

2. Bagaimana dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020 ?
3. Bagaimana dampak Dana Alokasi Umum (DAU) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020 ?
4. Bagaimana dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020 ?
5. Bagaimana dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020

### **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Sebagai keseluruhan, penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana dampak pendapatan pemerintah daerah melalui PDRB, PAD, DAU dan DAK dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dari tahun 2010 hingga 2020. Lebih dalam lagi, tujuan penelitian ini melalui rumusan masalah di atas antara lain :

1. Untuk menganalisis bagaimana dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atas Kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2010-2020
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2010-2020
3. Untuk menganalisis bagaimana dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020
4. Untuk menganalisis bagaimana dampak Dana Alokasi Umum (DAU) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020
5. Untuk menganalisis bagaimana dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020
6. Untuk menganalisis bagaimana dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atas Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2020

### 1.3.2 Manfaat penelitian

#### 1. Penulis

Untuk peneliti, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang ekonomi, memungkinkan peneliti untuk meningkatkan pengetahuan yang didapat selama duduk dibangku perkuliahan, tetapi juga berharap penulis dapat berpikir kritis dalam menganalisis khususnya di bidang ekonomi, Penulis dapat memahami masalah yang dihadapi.

#### 2. Masyarakat akademis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu Memberikan informasi dan gambaran implikasi anggaran berupa PDRB, PAD, DAU dan DAK, serta dampak IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

#### 3. Pemerintah terkait (stakeholder)

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menginformasikan kebijakan pembangunan terkait anggaran dan dampak IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dalam bentuk PDRB, PAD, DAU dan DAK.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk penelitian ini. Kajian empiris terdahulu didasarkan pada variabel independen yang sama, tujuan penelitian, metodologi, dan hasil analisis sebagai referensi. Ada satu penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, dan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

##### 2.1.1. Penelitian Sebelumnya

Paulus, Koleangan, dkk (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap kemiskinan melalui belanja daerah di kota Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kota Belitung. Kenaikan PAD akan menurunkan kemiskinan melalui belanja daerah.

Paat, dkk (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap kemiskinan di kota Bitung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di kota Bitung.

Giovanni (2018) melakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau jawa tahun 2009-2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi jawa barat, jawa tengah, jawa timur dan DIY. Sedangkan, variabel pengangguran tidak signifikan di pulau jawa.

Suliswanto (2012), melakukan penelitian tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Anwar (2016), dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kota Manado tahun 2001-2016. Dalam penelitiannya yang menggunakan Teknik regresi berganda memperoleh hasil bahwa variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD berpengaruh secara signifikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Konsep Kemiskinan**

Terdapat beberapa pengertian dan perspektif mengenai kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dalam bentuknya yang paling mendasar, kemiskinan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam segala aspek kehidupannya.

Menurut Lincoln (1992), kemiskinan terjadi karena adanya kekurangan modal. Kekurangan modal disebabkan oleh rendahnya investasi, rendahnya investasi disebabkan karena rendahnya pendapatan, rendahnya pendapatan diakibatkan karena rendahnya produktivitas dari tenaga kerja, modal serta sumber daya alam. Rendahnya produktivitas dapat disebabkan oleh faktor pendidikan dari tenaga kerja tersebut.

Kemiskinan sering digambarkan sebagai pendapatan rendah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan di Indonesia diukur dengan menggunakan standar (BPS 2020). Melalui pandangan tersebut kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan dari sisi pengeluaran.

Menurut Todaro kemiskinan digambarkan kondisi dimana seseorang tidak memiliki cukup pendapatan, utamanya dalam membeli barang-barang kebutuhan dasar. Adapun penyebab kemiskinan antara lain:

1. tingginya pertumbuhan jumlah penduduk,

2. tingkat pengguran yang tinggi,
3. kondisi ekonomi terbelakang,
4. penguasaan teknologi yang rendah
5. tingkat pendidikan rendah

Terdapat banyak jenis kemiskinan berdasarkan kelompok sasarannya. Klasifikasi jenis kemiskinan ini dirancang untuk memiliki tujuan dan indikator yang jelas untuk setiap tujuan proyek. Sumodiningrat (1999) Kemiskinan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Kemiskinan absolute (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan ketidakmampuan mengatasi kebutuhan dasar). 2) Kemiskinan relative (status kemiskinan di atas garis kemiskinan ditentukan oleh jarak antara miskin dan tidak miskin). 3) Kemiskinan struktural (kemiskinan terjadi ketika orang atau kelompok masyarakat tidak ingin memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mengeluarkannya).

### **2.2.2. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurut Badan Pusat Statistik (BPS), didefinisikan sebagai nilai total semua barang dan jasa yang dilaporkan oleh semua unit ekonomi di suatu negara. PDRB menurut Harga Berlaku menggambarkan harga barang dan jasa yang terikat dengan menggunakan harga tahunan, sedangkan PDRB menurut garis harga konstan menunjukkan harga barang dan jasa yang diikat dengan menggunakan tahun yang bersangkutan.

PDRB adalah kompilasi dari semua harga dan penilaian yang diberikan oleh pemerintah selama periode waktu yang relevan (1 tahun). Ada tiga metode untuk menghitung nilai semua produk yang dihasilkan oleh perekonomian tertentu pada tahun berjalan. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Cara Pengeluaran,**

Menurut metode ini, pendapatan nasional dikurangi dengan sejumlah besar pengeluaran yang ditujukan pada barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan. Menurut metode ini, upah nasional ditentukan oleh jumlah total uang



yang dihabiskan untuk mengkonsumsi barang, memproduksi barang, dan membayar pemerintah, sedangkan upah tenaga kerja disesuaikan dengan perubahan harga impor tertentu.

## 2. Cara Membuat Produk atau Netto

Dengan metode ini, pendapatan nasional dikurangi dengan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi setiap tahun yang disetujui oleh berbagai industri (lapangan usaha) dalam perekonomian. Ketika mengurangi pendapatan nasional melalui produksi, satu-satunya ukuran yang dipertimbangkan adalah jumlah nilai tambah, atau tambahan, produksi.

## 3. Cara Pembayaran

Pendapatan nasional ditangani dalam hal ini dengan menggabungkan pendapatan yang telah ditentukan oleh banyak faktor terkait produksi yang digunakan untuk menentukan pendapatan nasional. (Sukirno 2000)

### **2.2.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pembangunan daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi di daerah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah di Indonesia menghadapi kendala, akibat otonomi daerah belum dilaksanakan secara optimal. Maka dari itu, pemerintah menetapkan Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahun 2001 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Satu bentuk dari otonomi daerah yakni dengan terdapat desentralisasi fiskal, memberikan aliran pendapatan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan secara mandiri sesuai dengan potensinya.

Menurut (*UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*), Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pendapatan yang didapat oleh daerah dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah yakni tulang

panggung pendanaan daerah, sehingga kemampuan melakukan tabungan diukur dari nilai kontribusi pendapatan asli daerah atas APBD, semakin tinggi kontribusi yang dapat dilakukan oleh pendapatan asli daerah atas APBD semakin besar ketergantungan pemerintah daerah dengan bantuan pemerintah pusat. Menurut UU no. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PPN), berasal dari:

- 1) Pajak Daerah merupakan suatu jenis pungutan yang didasarkan dengan peraturan yang berlaku pada suatu daerah.
- 2) Redistribusi daerah merupakan suatu jenis pungutan dimana pungutan tersebut dilakukan berdasarkan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah secara langsung.

Melalui pelaksanaannya Kuncoro (2004), mendapati dimana PAD hanya mampu membayar belanja pemerintah daerah maksimal sebesar 20%. Dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah pusat mengirimkan Dana Perimbangan pada setiap daerah antar lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **2.2.4. Konsep Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana pemerintah pusat (APBN) yang bertujuan untuk mencapai pemerataan fiskal antar daerah, mendanai kebutuhan belanja pemerintah daerah di mana desentralisasi dilaksanakan. Dengan DAU, pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya.

Harahap (2017), menjelaskan bahwa DAU adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Artinya ada pengiriman dana dari pemerintah pusat ke daerah, dan pemerintah daerah akan mengalokasikan uang tersebut guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan

taraf hidup masyarakat dan menciptakan kehidupan yang sehat, dan harapan hidup yang lebih lama.

Sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah) Provinsi, Kabupaten, Kota yang Membutuhkan DAU, penetapan kebutuhan DAU daerah dengan pendekatan konsep disparitas fiskal. Berdasarkan kebutuhan lokal (*financial need*), memiliki potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan kata lain, DAU digunakan untuk menutup gap yang muncul karena permintaan lokal melebihi potensi pendapatan asli daerah yang ada. Sesuai dengan konsep disparitas fiskal, maka penyaluran DAU kepada daerah yang kapasitasnya relatif besar akan semakin kecil, dan daerah yang kemampuan keuangannya relatif rendah akan menerima DAU yang relatif lebih besar. Dalam praktiknya, dengan menggunakan konsep ini, perhitungan DAU untuk daerah yang memiliki kemampuan keuangan lebih besar dari kebutuhan keuangan akan menjadi negatif.

Dalam mencegah adanya penurunan kemampuan daerah untuk membiayai biaya yang telah ditanggungnya, perhitungan DAU menggunakan panduan perimbangan (sesuai PP No. 6 Tahun 2011 perihal dana perimbangan) selain formula anggaran fiskal. Setelah faktor penyeimbang tersedia, alokasi DAU daerah ditentukan dengan menghitung rumus kesenjangan fiskal dan faktor penyeimbang. Dana penyaluran umum untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus umum penyaluran dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor 33 Tahun 2004.

### **2.2.5 Konsep Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Harahap (2017), Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. DAK dimaksudkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang tertentu yang menjadi urusan daerah dan selaras dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan umum dasar yang belum memenuhi standar tertentu, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pengelolaan

Dana Alokasi Khusus (DAK), menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan DAK sebagai dana yang diberikan melalui daerah untuk melengkapi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria kebutuhan khusus, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ini :

- Kebutuhan yang tidak dapat dirumuskan dengan DAU
- Kebutuhan adalah komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan reboisasi oleh daerah penghasil.

#### **2.2.6. Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Badan Pusat Statistik (2009), menunjukkan bahwa pembangunan manusia menganggap manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan alat pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia tergantung pada seberapa banyak masalah sosial dasar yang dapat dipecahkan. Isu-isu ini termasuk kemiskinan, pengangguran, kekurangan gizi dan buta huruf. Terdapat banyak ukuran pembangunan manusia, tetapi tidak semuanya merupakan ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau negara. Untuk tujuan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan ukuran standar pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli, yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dari penduduk yang berpendidikan, sehat, dan berumur panjang, keterampilan dan pendapatan untuk hidup layak.

UNDP dan Badan Pusat Statistik menjelaskan definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah ukuran keberhasilan pembangunan manusia. Sejak tahun 1990, Program Pembangunan PBB telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Meskipun tidak dapat mengukur semua dimensi pembangunan, namun mampu mengukur dimensi dasar pembangunan manusia, yang dianggap sebagai kondisi yang mencerminkan kemampuan dasar suatu penduduk.

Perhitungan IPM didasarkan pada data yang dapat menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan paritas daya beli/daya beli (PPP). lintas negara. Masyarakat memenuhi beberapa kebutuhan dasar. Dalam hal jumlah rata-rata yang dibelanjakan per kapita, itu adalah metode pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan kehidupan yang layak.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan ukuran standar pembangunan manusia yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan bermanfaat, bukan hanya pendapatan per kapita, untuk melihat progres pembangunan yang digunakan selama ini. IPM dapat memahami bagaimana wilayah berkembang karena alasan berikut:

- A. IPM merupakan hal penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas manusia
- B. IPM menjabarkan bagaimana seorang manusia memiliki kesempatan dalam melihat hasil dari proses pembangunan, yang merupakan haknya, antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan.
- C. IPM dipakai dalam mengukur kinerja daerah, terutama dalam hal evaluasi perkembangan kualitas hidup masyarakat/penduduk.
- D. IPM saat ini menjadi satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas hidup manusia. Namun, itu tidak selalu mencerminkan situasi aktual.

Pada tahun 1990, United Nations Development Programme meluncurkan indikator yang dikembangkan sendiri yang dapat menggambarkan pembangunan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang disebut Human Development Index (HDI) atau Human Development Index (IPM). IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin mendekati 100, pembangunan manusia semakin baik. Berdasarkan nilai HDI tersebut, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. IPM < 50 (rendah)
2. 50 IPM < 80 (Sedang/Sedang)
3. IPM 80 (Tinggi)

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2004), Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks tiga dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia untuk memperluas pilihan. Rumus umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (Y1 + Y2 + Y3) \dots \dots$$

Dimana IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Y1 : Indeks Harapan Hidup

Y2 : Indeks Pendidikan

Y3 : Indeks Standar Hidup Layak

### **2.3. Hubungan Antar Variabel**

#### **2.3.1 Hubungan Antara PDRB Terhadap Kemiskinan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perhitungan seluruh barang maupun jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah. Sehingga jika semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu daerah artinya produktivitas masyarakat tinggi, jika produktivitas tenaga kerja tinggi akan mengurangi pengangguran sehingga kemiskinannya akan berkurang.

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memperhatikan apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara menyeluruh, akan tetapi bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan. Menurut Wongdesmiwati (2009), menjabarkan bahwa pengurangan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik bruto (PDB) riil dan faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja melalui sektor swasta dan pemerintah, perkembangan

teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.

Menurut Hermanto S. dan Dwi W. (2008) menyatakan seberapa penting percepatan laju pertumbuhan ekonomi dalam menekan jumlah penduduk miskin. Dikarena, salah satu indikator pembangunan ekonomi adalah dengan menurunnya jumlah kemiskinan.

### **2.3.2 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemiskinan**

Rustiadi dkk. (2010), peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD tidak menggambarkan peningkatan pendapatan masyarakat lokal itu sendiri. Namun dengan meningkatnya PAD dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan faktor sumber daya tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga nantinya dapat mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Dan dengan adanya kebijakan pemerintahan daerah sendiri atau proses pemerintahan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah daerah itu sendiri, maka akan dapat fokus pada kemiskinan dengan membuat peraturan yang memudahkan investor swasta untuk masuk dan berperan dalam pembangunan daerah. pembangunan ekonomi, mudah-mudahan nanti. Lowongan kerja berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di suatu daerah.

### **2.3.3. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan**

Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan pemerintah untuk kepentingan desentralisasi sehingga dapat mengembangkan kualitas pendidikan, mengembangkan taraf hidup masyarakat maupun mewujudkan kehidupan yang sehat, dan harapan hidup yang lebih panjang. Jika kualitas sumber daya manusia membaik akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat akan menurunkan kemiskinan.

Halim (2016) Menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut: Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan kebutuhan

pembiayaan daerah, dan DAU akan memberikan kepastian kepada kabupaten untuk mendanai kebutuhan belanja yang menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten, secara proporsional dengan penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN paling sedikit 26% dari jumlah neto.

Dengan desentralisasi fiskal, disparitas ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan kurangnya sumber penerimaan pajak dan sumber daya alam yang sulit diakses oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah pusat secara sukarela memberikan subsidi kepada daerah dalam bentuk hibah umum. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan diberikan dana distribusi umum yang lebih besar daripada daerah yang lebih kaya, dan sebaliknya.

#### **2.3.4. Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan**

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan daerah. Jika infrastruktur semakin membaik akan mempercepat proses produksi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Apabila tenaga kerja meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi kemiskinan.

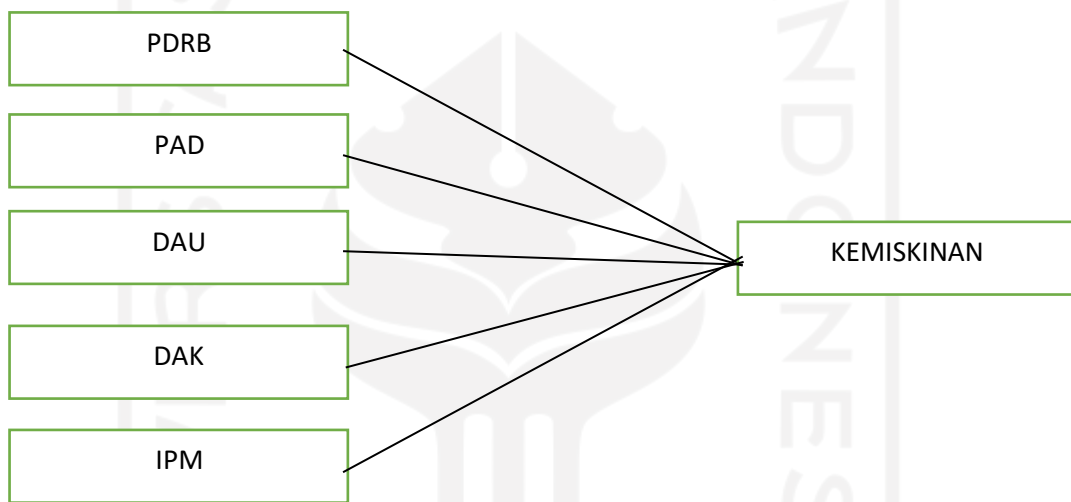
#### **2.3.5. Hubungan Antara IPM Terhadap Kemiskinan**

Teori Pertumbuhan Baru menekankan pentingnya peran pemerintah, terutama dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia dan Mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Padahal, dapat dilihat bahwa berinvestasi di bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin meningkat pula pengetahuan dan keterampilannya, yang mendorong peningkatan efisiensi kerja. Perusahaan mendapatkan lebih banyak hasil dengan mempekerjakan pekerja yang sangat produktif, sehingga perusahaan bersedia menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada mereka yang terlibat. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan meningkatkan hasil pertanian karena tenaga terampil dapat bekerja lebih efisien. (Sitepu R.K dan Sinaga B.M 2007)



Semakin banyak masyarakat yang bersekolah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan SDM akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat jika masyarakat semakin sejahtera akan membuka lowongan pekerjaan sehingga secara tidak langsung akan mengurangi kemiskinan. Tingkat produktivitas yang tinggi akan menghasilkan pekerja berkualitas tinggi dan peningkatan produksi. Produksi akan meningkat karena lebih banyak hasil yang diperoleh, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih tinggi. Sampai Indeks Pembangunan Manusia naik, kesejahteraan dan kemiskinan akan menurun.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran



#### 2.5. Hipotesis

Mengenai hipotesis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Diperkirakan variabel PDRB secara parsial berpengaruh negatif atas kemiskinan di provinsi Banten.
2. Diperkirakan variabel PAD secara parsial berpengaruh negatif atas kemiskinan di Provinsi Banten.
3. Diperkirakan variabel DAU secara parsial berpengaruh negatif atas kemiskinan di Provinsi Banten.
4. Diperkirakan variabel DAK secara parsial berpengaruh negatif atas kemiskinan di Provinsi Banten.

5. Diperkirakan variabel IPM secara parsial berpengaruh negatif atas kemiskinan di Provinsi Banten.

Diperkirakan variabel PDRB, PAD, DAU, DAK maupun IPM secara simultan berpengaruh positif atas kemiskinan di Provinsi Banten.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset panel, khususnya koneksi antara data time series dan cross section. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui jurnal, data yang dikumpulkan selama penelitian jenis lain atau sumber lain yang telah menjalani uji materi. Data yang digunakan dalam analisis penelitian ini berkisar antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Penelitian ini memakai 6 variabel data antara lain : a. Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Banten, datanya diperoleh dari BPS Banten dalam persen; b. PDRB di kabupaten/kota di Provinsi Banten datanya diperoleh dari BPS Banten dalam satuan angka; c. Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Banten yang datanya diperoleh dari BPS Banten dalam satuan angka; d. Dana Alokasi Umum di kabupaten/kota di Provinsi Banten yang datanya diperoleh dari BPS Banten dalam satuan angka; e. Dana Alokasi Khusus di kabupaten/kota di Provinsi Banten yang datanya diperoleh dari BPS Banten dalam satuan angka; f. IPM per kabupaten/kota di Provinsi Banten yang datanya diperoleh dari BPS Banten dalam persen.

##### **3.1.3 Cara Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Metode dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam makalah penelitian yang diterbitkan sebelumnya dan berpotensi layak. Informasi di atas dapat diperoleh dengan website, jurnal, rangkuman hasil ujian, maupun sumber lain yang terikat dengan penelitian akademik. Data yang ada di penelitian ini berasal dari BPS Banten.

- b) Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku, majalah dan karya sastra lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Menggunakan jurnal, buku puisi, atau bahkan penelitian terkini, siswa dapat melakukan studi mereka sendiri.

### **3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Ada dua jenis variabel data yang dimasukkan dalam penelitian ini: variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan satu variabel terikat dan empat variabel bebas.

Data skunder digunakan untuk melihat variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Variabel terikat dari penelitian ini yaitu Kemiskinan. Variabel bebas dari penelitian ini meliputi PDRB, PAD,DAU,DAK dan IPM.

Untuk mempermudah analisis dan memperjelas variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka dilakukan variabel operasional sebagai berikut :

#### **3.2.1 Variabel Dependen**

##### **Kemiskinan**

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur melalui sisi pengeluaran. Data yang digunakan bersumber melalui Badan Pusat Statistik yang dikalkulasikan berdasarkan data tahunan dan dinyatakan dalam persen.

#### **3.2.2 Variabel Independen**

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto adalah kalkulasi nilai tambah yang dihasilkan oleh badan usaha tunggal di wilayah tertentu atau oleh sektor ekonomi tunggal mana pun yang sebagian besar terdiri dari barang jadi maupun jasa akhir yang dihasilkan. Dalam penelitian ini PDRB yang dipakai adalah PDRB dasar harga konstan, dengan

tahun dasar tahun 2010. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). besaran mata uang yang dipakai dalam data ini adalah miliar rupiah.

#### **b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang didapat oleh suatu daerah dengan menghitung sumber-sumber dana yang ada untuk membiayai pembangunan yang biasa dilakukan, atau dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperuntukan untuk keperluan dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan daerah yang bersangkutan dan diperoleh dengan didasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.

#### **c. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan suatu bentuk penerimaan yang bersumber dari dana alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk pemerataan sebagai realisasi dari adanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam memenuhi kebutuhan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik yang dinyatakan dalam juta rupiah.

#### **d. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus adalah anggaran yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diperuntukan untuk membiayai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik yang dinyatakan dalam juta rupiah.

#### **e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu pembangunan manusia yang didasarkan pada suatu kuantitas hidup suatu masyarakat. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik yang dinyatakan dalam persen.

### 3.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu menggabungkan data time series dan data cross section. Menurut Widarjono (2009) keistimewaan dalam menggunakan data panel yaitu dapat melihat bagaimana pengaruh dari gabungan data time series dan cross section hingga dapat menghasilkan *degree of freedom*.

Variabel independen yaitu PDRB, PAD, DAU, DAK dan IPM. Variabel dependen yang digunakan yaitu Kemiskinan.

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$$

Persamaan yang digunakan yaitu :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + e_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Kemiskinan = Kemiskinan (persen)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien variabel independen

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (triliun rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (miliar rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (miliar rupiah)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (persen )

$e_i$  = standar error

$i$  = kabupaten/kota

$t$  = tahun

mengikuti rumus di atas, jelas bahwa dalam analisis ini variabel terikat (Y) berpengaruh terhadap variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5).

#### 3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2018) Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi data panel, dan secara umum ada tiga metode estimasi yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

### 3.3.1.1 Metode Common Effects Model

Teknik ini merupakan teknik estimasi yang paling sederhana parameter model data panel, yaitu dilalui oleh *time series* dan data *cross-section* sebagai satu kesatuan, tidak melihat adanya perbedaan apapun waktu dan entitas (individu). Cara yang kerap digunakan ialah Ordinary Least Square (OLS). Model *Common Effect* menampilkan perbedaan dimensi individu dan waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu adalah setara sepanjang waktu. Model persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots\dots\dots(2)$$

### 3.3.1.2 Metode Fixed Effects Model (FEM)

Model efek tetap menduga bahwa ada perbedaan intersep dalam persamaan. Teknik yang digunakan pada metode *fixed effect* adalah teknik estimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk melihat apakah terdapat perbedaan intersep. Model efek tetap mengasumsikan bahwa koefisien regresi (kemiringan atau *slope*) antara perusahaan dan dari waktu ke waktu adalah konstan. Model estimasi ini biasa dikenal dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Model *fixed effect* dengan variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{1i} + \beta_5 D_{2i} + \beta_6 D_{3i} + \dots + e_{it} \dots\dots(3)$$

### 3.3.1.3 Metode Random Effect Model (REM)

Pendekatan yang digunakan dalam *Random Effect* memperkirakan bahwa masing-masing perusahaan memiliki intersep yang berbeda, dimana intersep tersebut merupakan variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel dipilih secara acak dan mewakili populasi. Metode ini juga memperkirakan bahwa *error* bisa jadi berkorelasi *cross section* dan *time series*. Model *Random Effect* sering disebut sebagai *Error Component Model* (ECM). Karena interferensi antar variabel, teknik model OLS tidak efisien dalam mendapatkan estimator. Metode

yang tepat dalam mengestimasi model random effect adalah Generalized Least Squares (GLS).

Penulisan konstanta-konstanta dalam model random effect tidak lagi tetap tetapi dipilih secara acak, sehingga modelnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots\dots\dots(4)$$

### 3.4 Pemilihan Model

Ada tiga teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi untuk data panel, yaitu menggunakan metode OLS (*common*), model *fixed effect*, dan model *random effect*. Dalam memilih model yang tepat untuk digunakan dalam mengestimasi suatu model regresi dengan menggunakan data panel, maka perlu dilakukan beberapa pengujian agar mendapatkan model yang terbaik, yaitu:

#### 3.4.1 Uji Statistik F atau *Chow Test*

Pengujian dapat dipraktikkan dengan menentukan apakah model yang akan dianalisis menerapkan *common effect* maupun *fixed effect* menggunakan Uji Chow. Dugaan yang diterapkan antara lain sebagai berikut:

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima apabila probabilitas  $>$  ( $\alpha$ ) yang berarti model yang baik untuk diterapkan adalah *Common Effect Model*.
2.  $H_a$  diterima apabila probabilitas  $<$  ( $\alpha$ ) yang berarti model yang baik untuk diterapkan adalah *Fixed Effect Model*.

#### 3.4.2. Hausman Test

Pengujian untuk menentukan apakah model yang akan dianalisis menerapkan *random effect* atau *fixed effect* dapat dipraktikkan dengan uji Hausman. Dugaan yang diterapkan dalam uji Hausman antara lain :



Ho : *Random Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Dengan anggapan antara lain:

1. Ho diterima apabila probabilitas  $>$  ( $\alpha$ ) yang berarti model yang baik guna diterapkan yaitu *Random Effect Model*.

2. Ha diterima apabila probabilitas  $<$  ( $\alpha$ ) yang berarti model yang baik guna diterapkan yaitu *Fixed Effect Model*.

Apabila nilai dari statistik hausman mendominasi dibandingkan nilai kritisnya maka akan menolak hipotesis nol atau model yang tepat untuk digunakan yaitu model *fixed effect*, sedangkan apabila nilai dari uji hausman lebih kecil dibandingkan nilai kritisnya maka urung untuk menolak hipotesis nol dan metode yang tepat adalah *random effect* (Widarjono,2013).

### 3.4.3. Uji Statistik

Uji statistik yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t), Uji Koefisien Regresi Bersama (Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>).

#### 3.4.3.1 Uji T

Koefisien regresi parsial atau biasa disebut dengan uji t dipakai dalam melihat seberapa dampak masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-t dapat dilakukan dengan cara mengumpamakan nilai probabilitas  $<0,05$  maka dinyatakan signifikan. Hipotesis individu adalah:

a. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

H<sub>0</sub>:  $\beta_1 \geq 0$ , artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak mempengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>1</sub>:  $\beta_1 < 0$ , maka terdapat variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

b. Variabel pendapatan asli daerah (PAD)

H0:  $\beta_1 \geq 0$ , artinya variabel Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H1:  $\beta_1 < 0$ , maka terdapat variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

c. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

H0:  $\beta_1 \geq 0$ , artinya variabel Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H1:  $\beta_1 < 0$ , maka terdapat variabel dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

d. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

H0:  $\beta_1 \geq 0$ , artinya variabel Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H1:  $\beta_1 < 0$ , maka terdapat variabel dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

e. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

H0:  $\beta_2 \geq 0$ , artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota tidak mempengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H1:  $\beta_2 < 0$ , maka terdapat variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan)

#### 3.4.3.2 Uji F

Uji-F dimaksudkan untuk menguji hipotesis koefisien regresi (slope) secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas

ke variabel terikat. Hipotesis Uji-F yaitu :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

Apabila  $F_{hitung} > F_{kritis}$  maka tolak  $H_0$ , maknanya variabel bebas serentak berpengaruh terhadap variabel terikat. Apabila  $F_{hitung} < F_{kritis}$  maka terima  $H_0$  yang maknanya secara serentak variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

#### 3.4.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur variasi kemiskinan disekitar rata-rata yang dijelaskan oleh variasi variabel independent yang digunakan yaitu PDRB, PAD, DAU, DAK dan IPM.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk melihat seberapa besar kemampuan model untuk menjabarkan variabel dependen yang dihitung. nilai  $R^2$  mendekati nol artinya kemampuan variabel bebas menjabarkan bahwa variabel terikat sangat terbatas atau kecil. nilai  $R^2$  mendekati 1, artinya variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### 4.1. Deskripsi Data

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder berjenis data panel dalam kurun waktu 11 tahun dihitung mulai dari tahun 2010 hingga 2020 pada delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten yaitu, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Data yang digunakan berasal dari lembaga khusus seperti Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Banten selama beberapa tahun. Variabel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan yang digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah PDRB, PAD, DAU, DAK dan IPM.

**Tabel 4.2-Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	Mean	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
Kemiskinan (persen)	5.792045	1.330000	11.14000	2.560146
PDRB (triliun rupiah)	46.21087	12.27954	110.5928	28.32220
PAD (miliar rupiah)	712.3225	26.53575	2872.569	722.0337
DAU (miliar rupiah)	802.0564	228.8585	1222.972	269.3402
DAK (miliar rupiah)	252.1117	0.144306	8311.839	880.5313
IPM (persen)	69.52977	58.83000	81.48000	6.182787

*Sumber : Hasil olah data evienvs 10*

Pada tabel 4.1 rata-rata kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 5.792045%, kemudian kemiskinan tertinggi di Banten terdapat di Kabupaten Pandeglang sebesar 11,14% pada tahun 2010, kemiskinan terendah di Banten terdapat di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,33% pada tahun 2012. Kebanyakan PDRB yang ada di Banten sejumlah Rp. 46,21087 triliun , sementara PDRB tertinggi di Banten terdapat di Kota Tangerang Selatan sejumlah Rp. 110,5928 triliun, kemudian untuk PDRB terendah di Banten di Kabupaten Pandeglang sejumlah Rp. 12,27954 triliun,

Kebanyakan pendapatan asli daerah di Banten sejumlah Rp. 712,3225 miliar, kemudian pendapatan asli daerah tertinggi di Banten berada di kabupaten Tangerang sejumlah Rp. 2872,569 miliar, dan pendapatan asli daerah terendah di Banten berada di kota Serang sejumlah Rp. 26.53575 miliar. Sedangkan kebanyakan DAU di Banten sejumlah Rp. 802,0564 miliar, kemudian DAU tertinggi di Banten berada di kabupaten Tangerang sejumlah Rp. 1222,972 miliar, dan DAU terendah di Banten berada di kota Tangerang Selatan sejumlah Rp. 228,8585 miliar.

Rata-rata DAK di Banten sebesar Rp. 252,1117 miliar, kemudian DAK tertinggi di Banten berada di kabupaten Lebak sebesar Rp. 8311,839 miliar, dan DAK terendah di Banten berada di kota Cilegon sebesar Rp. 0,144306 miliar. Sedangkan rata-rata indeks pembangunan manusia di Banten sebesar 69,52977%, kemudian IPM tertinggi di Banten berada di kota Tangerang Selatan sebesar 81,48%, dan IPM terendahnya berada di kabupaten Lebak sebesar 58,83%.

Setelah mengumpulkan data langkah selanjutnya yaitu dengan dilakukannya analisis data dengan maksud untuk melihat bagaimana dampak PDRB, PAD, DAU, DAK maupun IPM atas Kemiskinan di provinsi Banten. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} \dots\dots\dots(5)$$

## 4.2. Hasil dan Analisis Data

### 4.2.1 Pemilihan Model Regresi

Ada tiga model yang dapat diterapkan pada panel data regresi: model *common effect*, model *fixed effect*, dan model *random effect*. Untuk mengidentifikasi model terbaik, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dengan diterapkan uji chow dan uji hausman.

Hasil pengembangan model adalah antara lain:

#### 4.2.1.1. Chow Test (Uji F-Statistik)

Untuk menentukan model yang tepat antar *common effect model* atau *model fixed effect* yang akan diterapkan lebih efektif, pengujian Chow harus dilakukan.

H0 : model yang diterapkan *Common Effect Model*

H1 : model yang diterapkan *Fixed Effect Model*

Dengan anggapan :

Apabila p-value >  $\alpha$  (5%), maka H0 diterima dan

Apabila p-value <  $\alpha$  (5%), maka H0 ditolak

**Tabel 4.3- Hasil Uji Chow**

Effect test	statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	142.427946	(7,75)	0.0000
Cross-section Chi-square	234.061445	7	0.0000

Sumber : Hasil olah data evienvs 10

Hasil dari uji chow pada tabel 4.2 diatas bahwa semua variabel yang digunakan memiliki probabilitas Cross-section dan Cross-section chi-square sebesar 0.0000 berarti lebih kecil dibandingkan  $\alpha$  0,05 ( $\alpha=5\%$ ), sehingga dapat disimpulkan apabila hasilnya adalah H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang layak diterapkan merupakan fixed effect model.

#### 4.2.1.2. Uji Hausman

Dari estimasi pengujian di atas maka uji harus dilanjutkan untuk menentukan apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* dengan menggunakan uji *Hausman test*.

H0 : model yang diterapkan *Random Effect Model*

H1 : model yang diterapkan *Fixed Effect Model*

Dengan anggapan :

Apabila p-value >  $\alpha$  (5%), Maka H0 diterima

Apabila p-value <  $\alpha$  (5%), maka H0 ditolak

**Tabel 4- Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-sq. statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.372454	5	0.0038

Sumber : Hasil olah data eviens 10

estimasi dari uji hausman pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section random sebesar 0.0038 lebih kecil dibandingkan  $\alpha$  sebesar 0.05 ( $\alpha=5\%$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya model yang layak diterapkan adalah fixed effect model.

#### 4.2.1.3. Estimasi Hasil *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.396793	4.094248	0.585405	0.5600
PDRB	-0.036293	0.015591	-2.327790	0.0226
PAD	0.000382	0.000246	1.551471	0.1251
DAU	-0.002461	0.000511	-4.815316	0.0000
DAK	-1.795406	5.140105	-0.034851	0.9723
IPM	0.175311	0.082577	2.123032	0.0372
R-Square	0.979079			
Adjusted R-Square	0.975732			
F-statistic	292.4923			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 5.4- Hasil Fixed Effect

Sumber : hasil olah data eviens 10

### 4.3. Uji Hipotesis

#### 4.3.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai R-square untuk data di atas adalah sekitar 0.979815. Artinya variabel terikat, kemiskinan, dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu PDRB, PAD, DAU, DAK, dan IPM dengan laju sekitar 97,90%, dan variabel terikat yaitu sisa dengan laju sekitar 97,90%. 2,1%, oleh variabel lain.

#### 4.3.2. Uji Serempak (Uji-F)

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel dependen secara signifikan mengungguli variabel independen atau tidak. Estimasi regresi menunjukkan probabilitas F-statistik sekitar 292,4923 dan probabilitas 0,000000 5%, menunjukkan bahwa variabel dependen secara signifikan mengungguli variabel independen.

#### 4.3.3. Uji T

##### 1. Jumlah PDRB (X1)

Menurut estimasi regresi diatas didapatkan koefisien variabel X1 sebesar - 0.036293 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0226 < \alpha = 5\%$ , maknanya yaitu variabel X1 (jumlah PDRB) signifikan dan berpengaruh negatif kepada kemiskinan di provinsi Banten.

##### 2. Jumlah PAD (X2)

Menurut estimasi regresi diatas didapatkan koefisien variabel X2 sebesar 0.000382 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.1251 > \alpha = 5\%$ , maknanya yaitu variabel X2 (jumlah PAD) tidak signifikan dan berpengaruh positif kepada kemiskinan di provinsi Banten.

##### 3. Jumlah DAU (X3)

Menurut estimasi regresi diatas didapatkan koefisien variabel X3 sebesar - 0.002461 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha = 5\%$ , maknanya yaitu variabel X3 (jumlah DAU) signifikan dan berpengaruh negatif kepada kemiskinan di provinsi Banten.

##### 4. Jumlah DAK (X4)

Menurut estimasi regresi diatas didapatkan koefisien variabel X4 sebesar - 1.795406 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.9723 > \alpha = 5\%$ , maknanya variabel X4 (jumlah DAK) tidak signifikan dan berpengaruh negatif kepada kemiskinan di provinsi Banten.

##### 5. Jumlah IPM (X5)

Menurut estimasi regresi diatas didapatkan koefisien variabel X5 sebesar 0.175311 dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0372 < \alpha = 5\%$ , maknanya variabel X5 (jumlah IPM) signifikan dan berpengaruh positif kepada kemiskinan di provinsi Banten.



#### **4.4. Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen**

##### **4.4.1. Analisis Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten**

Menurut estimasi regresi dengan model Fixed effect, variabel PDRB memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan kemiskinan di Provinsi Banten. Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditemukan di antara PDRB adalah  $-0,036293$ , dengan koefisien probabilitas sekitar  $0,0226$ . Dengan demikian, jika PDRB turun di bawah 1%, maka kemungkinan penurunan kemiskinan sekitar  $0,036293$  persen.

Menurut Hermanto S. dan Dwi W. (2008) menyatakan seberapa penting percepatan laju pertumbuhan ekonomi dalam menekan jumlah penduduk miskin. Dikarena, salah satu indikator pembangunan ekonomi adalah dengan menurunnya jumlah kemiskinan.

Peningkatan PDRB menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi tingkat produktivitasnya, jika produktivitas masyarakat tinggi akan mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

##### **4.4.2. Analisis Pengaruh PAD terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten**

Berdasarkan hasil regresi dengan model Fixed Effect, variabel PAD berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara jumlah PAD dengan estimasi probabilitas antara  $0,000382$  sampai dengan  $0,1251$ . Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prasad 1998), memperoleh hasil dimana tidak ada hubungan yang kongkrit antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Di beberapa negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan dugaan hipotesis yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil yang telah diteliti sebelumnya oleh Devito (2017), dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan (studi empiris Pada kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015)” dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh (Kawulur, Kolenangan, and C. Wauran 2019) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian tidak meyakinkan dan tidak mendukung teori tentang hubungan antara pendapatan asli daerah dan kemiskinan.

#### **4.4.3. Analisis Pengaruh DAU terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel angka DAU memiliki hubungan positif dan negatif yang signifikan dengan kemiskinan di Provinsi Banten. Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk jumlah DAU adalah sekitar -0,002461 dengan nilai probabilitas sekitar 0,0000. Dengan demikian, apabila DAU naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,002461 persen. Apabila jumlah DAU berdampak negatif, penggunaan Dana Alokasi Umum akan menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa DAU dipengaruhi secara negatif terhadap kemiskinan.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya oleh Khairina (2021) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola DAU dapat dilihat dari besarnya alokasi dana yang digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Penggunaan DAU menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan desentralisasi (Rukmana dan Heru Satria 2020).

DAU berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan pengalokasian DAU yang optimal akan berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah mengalokasikan dana untuk memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat.

#### **4.4.4. Analisis Pengaruh DAK terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten**

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa DAK mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di provinsi

Banten. Hasil estimasi diperoleh koefisien sebesar  $-1.795406$  dengan probabilitas sebesar  $0.9723$ . Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Anwar, dkk (2016), yaitu “Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado tahun 2001-2013) penelitian tersebut melihat bahwa dana alokasi khusus tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 tahun 2005 tentang dana perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diajukan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus. Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Apabila dana alokasi khusus mengalami peningkatan belum tentu dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, artinya peningkatan DAK di setiap tahun tidak dapat menekan jumlah penduduk miskin ( Khusnul, dkk (2019)).

#### **4.4.5. Analisis Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten**

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Hasil estimasi diperoleh koefisien yaitu sebesar  $0.097447$  dengan probabilitas sebesar  $0.0097$ . hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2007), mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Indeks pembangunan manusia (IPM) mencerminkan bagaimana keadaan penduduk suatu wilayah memiliki kesempatan untuk merasakan hasil dari pembangunan dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan dan sebagainya. Menurut Napitupulu (2007), mengatakan bahwa IPM memiliki tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia yaitu aspek pemenuhan kebutuhan untuk hidup yang lebih lama, hidup sehat dan mendapatkan pengetahuan. Ketiga hal tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Menurut apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan hasil, yaitu :

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Artinya kenaikan jumlah PDRB setiap tahunnya akan menekan angka kemiskinan. Dengan begitu PDRB dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah.
2. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Hal tersebut karena tidak ada hubungan yang kongkrit antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di beberapa daerah.
3. Variabel DAU berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Artinya setiap kenaikan DAU akan menurunkan kemiskinan secara signifikan. Dengan demikian, pemerintah daerah tersebut dapat mengelola DAU dengan optimal sehingga dapat mengurangi kemiskinan.
4. Variabel DAK berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Artinya setiap kenaikan atau penurunan DAK tidak berpengaruh pada kemiskinan di provinsi Banten.
5. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten. Artinya setiap kenaikan IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Banten. Hal ini karena IPM mencerminkan keadaan penduduk di wilayah tersebut.

#### 5.2. Implikasi dan Saran

1. Dengan terjadinya peningkatan PDRB yang dapat menekan tingkat kemiskinan, di harapkan dapat terus ditingkatkan dan di perbaiki dalam hal kualitas sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan PDRB dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang akan menekan tingkat kemiskinan masyarakat.

2. Dengan adanya DAU yang dapat menekan tingkat kemiskinan, di harapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan DAU dengan optimal. Peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas masyarakat, Sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat karena adanya pelayanan yang baik. Kegiatan kegiatan tersebut akan menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Meilita Lukitasari, Sutomo Wim Palar, and Jacline I. Sumual. 2016. "Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2):218–32.
- BPS. 2020. "Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota."
- Frans, Devito, Sri Rahayu, Dewa Putra, and Khrisna Mahardika. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pendidikan (Studi Empiris Pada Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015)." *E-Proceeding of Management* 4(2):1666–75.
- Giovanni, Ridzky. 2018. "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2009-2016." *Economics Development Analysis Journal* 7(1):23–31. doi: 10.15294/edaj.v7i1.21922.
- Gumelar, Agum, and Najwa Khairina. 2021. "Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019)." *Jurnal Ekonomi-Qu* 11(2):342. doi: 10.35448/jequ.v11i2.13231.
- Halim, Abdul. 2016. "Manajemen Keuangan Sektor Publik."
- Harahap, Riva Ubar. 2017. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatra Utara."
- Kawulur, Sandy, A. .. Kolenangan, and Patrick C. Wauran. 2019. "Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19(03):107–17.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. "Autonomy and Regional Development." *Yogyakarta: Publisher Grants*.
- Lincoln, Arsyad. 1992. "Memahami Masalah Kemiskinan Di Indonesia."

- Napitupulu, Apriliyah. 2007. "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatra Utara."
- Paat, Dewi Chrisanty, Rosalina A. M. Koleangan, and Vekie Adolf Rumat. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(1):1–10. doi: 10.35794/jpekd.15774.19.1.2017.
- Paulus, Dewi Irma Septiyani, Rosalina A. M. Koleangan, and Daisy S. M. Engka. 2019. "Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung." *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19(2):1–18. doi: 10.35794/jpekd.15781.19.2.2017.
- Prasad, B. C. 1998. "The Woes of Economic Reform: Poverty and Income Inequality in Fiji."
- R.K, Sitepu, and Sinaga B.M. 2007. "Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium (The Impact Of Human Capital Investment On Economic Growth And Poverty In Indonesia: Computable General Equilibrium.)"
- Rukmana, and Heru Satria. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016." *Annals of Tourism Research* 61–72.
- Statistika, Badan Pusat. 2009. "Statistik Banten 2009."
- Sukirno, Sadono. 2000. "Makroekonomi Modern."
- Suliswanto, Muhammad. 2012. "Pengaruh Produk Domestik Bruto Dan Indeks Pembangunan Manusia." *Ub Malang* 3:3.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. "JPS Dan Pemberdayaan. Gramedia. Jakarta
- UNDP. 2000." *Overcoming Human Poverty*.
- Widarjono, Agus. 2018. "Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai

Panduan Eviews.”

Wongdesmiwati. 2009. “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia : Analisis Ekonometrika.”





## LAMPIRAN

### Lampiran I

Data kemiskinan, IPM, PDRB, PAD, DAU dan DAK

kabupaten/kot a	Tahu n	Kemiski nan	IPM	PDRB	PAD	DAU	DAK
Kab Lebak	2010	10,38	58,83	12,57	64,75	655,63	91,15
Kab Lebak	2011	9,2	59,82	13,33	93,07	737,43	71,13
Kab Lebak	2012	8,63	60,22	14,01	127,30	804,12	66,46
Kab Lebak	2013	9,5	61,13	14,89	136,18	901,74	121,19
Kab Lebak	2014	9,17	61,64	15,76	244,45	1000,8 8	104,22
Kab Lebak	2015	9,97	62,03	16,73	301,54	1029,2 3	245,67
Kab Lebak	2016	8,71	62,78	17,67	304,49	1100,3 4	458,15
Kab Lebak	2017	8,64	62,95	18,68	467,47	1081,0 1	289,57
Kab Lebak	2018	8,41	63,37	19,74	349,36	1086,6 6	387,75
Kab Lebak	2019	8,3	63,88	20,83	334,72	1127,1 9	492,78
Kab Lebak	2020	9,24	63,91	20,65	377,50	1014,3 9	428,87
Kab Pandeglang	2010	11,14	59,08	12,28	31,80	695,08	89,35

Kab Pandeglang	2011	9,8	59,92	12,98	56,18	723,98	91,78
Kab Pandeglang	2012	9,28	60,48	13,74	54,05	880,79	104,86
Kab Pandeglang	2013	10,25	61,35	14,39	80,58	988,54	141,86
Kab Pandeglang	2014	9,5	62,06	15,10	140,05	1077,0 8	128,03
Kab Pandeglang	2015	10,43	62,72	15,97	163,92	1107,0 7	131,76
Kab Pandeglang	2016	9,67	63,4	16,86	198,75	1184,9 9	410,91
Kab Pandeglang	2017	9,74	63,82	17,87	387,10	1164,1 7	404,20
Kab Pandeglang	2018	9,61	64,34	18,81	197,00	1171,6 5	385,63
Kab Pandeglang	2019	9,42	64,91	19,71	218,33	1214,0 0	476,64
Kab Pandeglang	2020	9,92	65	19,60	189,19	1107,2 4	454,42
Kab Serang	2010	6,34	60,96	33,84	138,82	612,45	48,69
Kab Serang	2011	5,63	61,97	35,91	216,96	629,38	64,55
Kab Serang	2012	5,28	62,97	37,85	253,78	785,47	64,71
Kab Serang	2013	5,02	63,57	40,14	417,68	868,65	75,49
Kab Serang	2014	4,87	63,97	42,30	464,33	950,70	83,75

Kab Serang	2015	5,09	64,61	44,45	579,61	970,42	96,79
Kab Serang	2016	4,58	65,12	46,72	590,87	1090,1 4	250,82
Kab Serang	2017	4,63	65,6	49,15	815,40	1070,9 9	309,07
Kab Serang	2018	4,3	65,93	51,75	697,09	1078,4 1	387,69
Kab Serang	2019	4,08	66,38	54,35	707,87	1122,2 4	399,09
Kab Serang	2020	4,94	66,7	53,29	701,22	1030,5 1	330,98
Kab Tangerang	2010	7,18	68,01	58,10	354,77	714,57	70,53
Kab Tangerang	2011	6,42	68,45	62,02	665,23	720,49	51,52
Kab Tangerang	2012	5,71	68,83	65,85	839,87	1016,9 0	84,83
Kab Tangerang	2013	5,78	69,28	70,07	1218,5 8	1115,3 7	90,03
Kab Tangerang	2014	5,26	69,57	73,83	1576,3 2	1213,8 6	103,91
Kab Tangerang	2015	5,71	70,05	77,96	1851,2 0	1212,9 4	166,52
Kab Tangerang	2016	5,29	70,44	82,18	2054,7 2	1196,6 4	485,24
Kab Tangerang	2017	5,39	70,97	86,96	2786,6 5	1175,6 2	347,26

Kab Tangerang	2018	5,18	71,59	92,01	2872,5 7	1176,5 5	381,46
Kab Tangerang	2019	5,14	71,93	97,14	2812,9 3	1222,9 7	363,73
Kab Tangerang	2020	6,23	71,92	93,54	2465,3 7	1107,3 9	380,41
Kota Cilegon	2010	4,46	68,8	44,68	150,25	279,13	0,33
Kota Cilegon	2011	3,98	69,26	47,63	253,21	315,49	3,95
Kota Cilegon	2012	3,82	70,07	51,30	334,02	405,58	0,33
Kota Cilegon	2013	3,99	70,99	54,73	291,94	461,40	5,56
Kota Cilegon	2014	3,81	71,57	57,26	467,95	490,92	0,14
Kota Cilegon	2015	4,1	71,81	59,98	579,59	514,38	5,07
Kota Cilegon	2016	3,57	72,04	62,98	567,67	605,98	191,05
Kota Cilegon	2017	3,52	72,29	66,44	652,08	595,34	134,96
Kota Cilegon	2018	3,25	72,65	70,50	578,34	597,86	124,00
Kota Cilegon	2019	3,03	73,01	74,25	634,80	643,89	124,71
Kota Cilegon	2020	3,69	73,05	73,60	717,40	597,55	123,74
Kota Serang	2010	7,03	68,25	12,55	26,54	316,00	45,73
Kota Serang	2011	6,25	68,69	13,60	41,89	365,68	47,24
Kota Serang	2012	5,7	69,43	14,60	58,67	442,55	49,46
Kota Serang	2013	5,92	69,69	15,67	65,38	513,77	35,56
Kota Serang	2014	5,7	70,26	16,75	97,83	564,28	42,08
Kota Serang	2015	6,28	70,51	17,81	111,06	584,91	47,93

Kota Serang	2016	5,58	71,09	18,94	126,90	647,99	120,61
Kota Serang	2017	5,57	71,31	20,15	232,46	636,60	166,13
Kota Serang	2018	5,36	71,68	21,48	164,22	636,60	146,97
Kota Serang	2019	5,28	72,1	22,81	190,03	674,62	156,49
Kota Serang	2020	6,06	72,16	22,52	180,26	613,72	156,32
Kota Tangerang	2010	6,88	73,69	66,92	230,63	488,98	7,55
Kota Tangerang	2011	6,14	74,15	71,86	499,08	554,06	11,62
Kota Tangerang	2012	5,56	74,57	76,95	631,52	747,70	6,85
Kota Tangerang	2013	5,26	75,04	81,97	815,73	829,39	8311,8 4
Kota Tangerang	2014	4,91	75,87	86,18	1258,7 4	890,21	11,42
Kota Tangerang	2015	5,04	76,08	90,81	1471,9 4	887,03	28,05
Kota Tangerang	2016	4,94	76,81	95,65	1590,0 8	881,60	171,23
Kota Tangerang	2017	4,95	77,01	101,27	1991,9 0	866,11	204,65
Kota Tangerang	2018	4,76	77,92	106,28	1864,3 9	866,11	213,59
Kota Tangerang	2019	4,43	78,43	110,59	2027,1 1	964,84	206,52

Kota Tangerang	2020	5,22	78,25	102,94	1649,0 2	843,00	227,55
Kota Tangerang Selatan	2010	1,67	76,3	30,53	131,50	228,86	11,94
Kota Tangerang Selatan	2011	1,5	76,99	33,21	420,66	412,54	57,97
Kota Tangerang Selatan	2012	1,33	77,68	36,09	576,30	473,31	46,69
Kota Tangerang Selatan	2013	1,75	78,65	39,25	728,97	536,18	0,27
Kota Tangerang Selatan	2014	1,68	79,17	42,41	1258,7 4	890,21	11,42
Kota Tangerang Selatan	2015	1,69	79,38	45,49	1471,9 4	887,03	28,05
Kota Tangerang Selatan	2016	1,67	80,11	48,55	1346,2 4	581,51	118,67
Kota Tangerang Selatan	2017	1,76	80,84	52,10	1622,0 1	572,64	127,77

Kota Tangerang Selatan	2018	1,68	81,17	56,00	1621,7 1	571,88	141,16
Kota Tangerang Selatan	2019	1,68	81,48	60,15	1817,5 1	609,58	143,29
Kota Tangerang Selatan	2020	2,29	81,36	59,54	1536,6 2	558,08	155,95



## Lampiran II

### Hasil estimasi common effect

Method: Panel Least Squares

Date: 07/14/22 Time: 15:38

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.78300	3.464076	6.288255	0.0000
IPM	-0.249326	0.045231	-5.512321	0.0000
PDRB	-0.010519	0.009900	-1.062561	0.2911
PAD	-0.000301	0.000482	-0.625040	0.5337
DAU	0.002499	0.000919	2.720176	0.0080
DAK	0.000154	0.000182	0.846600	0.3997
R-squared	0.700970	Mean dependent var	5.792045	
Adjusted R-squared	0.682736	S.D. dependent var	2.560146	
S.E. of regression	1.442032	Akaike info criterion	3.635730	
Sum squared resid	170.5154	Schwarz criterion	3.804639	
Log likelihood	-153.9721	Hannan-Quinn criter.	3.703779	
F-statistic	38.44395	Durbin-Watson stat	0.205353	
Prob(F-statistic)	0.000000			



### Lampiran III

Hasil estimasi fixed effect

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 07/14/22 Time: 13:04

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.415563	4.091371	0.590404	0.5567
PDRB	-0.036299	0.015612	-2.325096	0.0228
PAD	0.000382	0.000247	1.550860	0.1251
DAU	-0.002459	0.000511	-4.811114	0.0000
DAK	-1.682315	5.136651	-0.032751	0.9740
IPM	0.175311	0.082577	2.123032	0.0372

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.979076	Mean dependent var	5.792045
Adjusted R-squared	0.975729	S.D. dependent var	2.560146
S.E. of regression	0.398853	Akaike info criterion	1.135156
Sum squared resid	11.93126	Schwarz criterion	1.501127
Log likelihood	-36.94688	Hannan-Quinn criter.	1.282597
F-statistic	292.4549	Durbin-Watson stat	1.592841
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Lampiran IV

### Hasil estimasi Random Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/14/22 Time: 16:50

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 88

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.24158	3.519116	2.910271	0.0046
IPM	-0.033618	0.057813	-0.581507	0.5625
PDRB	-0.022102	0.014014	-1.577101	0.1186
PAD	0.000250	0.000233	1.074771	0.2856
DAU	-0.001579	0.000456	-3.462820	0.0009
DAK	-1.056305	5.130005	-0.204100	0.8388

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		1.727980	0.9494
Idiosyncratic random		0.398828	0.0506

Weighted Statistics			
R-squared	0.448587	Mean dependent var	0.402099
Adjusted R-squared	0.414964	S.D. dependent var	0.559384
S.E. of regression	0.427859	Sum squared resid	15.01122
F-statistic	13.34177	Durbin-Watson stat	1.273155
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

---

---

R-squared	0.094213	Mean dependent var	5.792045
Sum squared resid	516.5053	Durbin-Watson stat	0.037002

---

---



## Lampiran V

### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	142.427946	(7,75)	0.0000
Cross-section Chi-square	234.061445	7	0.0000



## Lampiran VI

### Hasil Estimasi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.372454	5	0.0038



